

JURNAL SKRIPSI

PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG- UNDANG BANTUAN HUKUM NOMOR 16 TAHUN 2011



Disusun oleh:

PARNINGOTAN TUA MARBUN

NPM : 09 05 10188
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL SKRIPSI**

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA
ORANG YANG TIDAK MAMPU SETELAH
DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG BANTUAN
HUKUM NOMOR 16 TAHUN 2011**



Diajukan oleh:

PARNINGOTAN TUA MARBUN

NPM : 09.05.10188
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 28 April 2014

Dosen Pembimbing,

CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN
BANTUAN HUKUM KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU
SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG BANTUAN
HUKUM NOMOR 16 TAHUN 2011**

Parningotan Tua Marbun

CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Abstrak. Skripsi ini berjudul PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM. Tujuan dari penulisan hukum ini untuk mengetahui bagaimanakah peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu setelah diundangkannya undang-undang bantuan hukum. Skripsi ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Setelah melakukan analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran lembaga bantuan hukum lebih luas, selain memberikan bantuan hukum litigasi LBH juga melakukan bantuan hukum non-litigasi dan pendidikan hukum, semua dana program bantuan hukum didapat dari pemerintah, sehingga bantuan hukum lebih terfokus karena LBH tidak lagi mengalami kesulitan dalam pendanaan program bantuan hukum. Namun demikian LBH masih terkendala

dalam mengimplementasikan undang-undang bantuan hukum, seperti pada tataran konsep dan praktis.

Kata kunci: Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Orang yang Tidak Mampu.

Abstrack. The title of this research is “THE ROLE OF LEGAL ASSISTANT INSTITUTE IN HELPING THE NEEDY PEOPLE AFTER THE ACT 16 in 2011 about legal assistant was being establish by the law” the purpose of this research is to find out how was the role of Legal Assistant Institute in helping the needy people after the ACT NO 16 in 2011 about legal assistant was being establish by the law. This research is using a normative judicial research metode, it’s focused on a positive law. After doing some analysis for the discussion and the result of the research that the writer have been doing, we can conclude that the role of the Legal Assistant Institute Widely, despite of giving a law litigation help the Legal Assistant Institute is also giving a law non-litigation help and law education, all of the law helping program fund was obtained from the government, so the law help was more focused because the Legal Assistant Institute has no struggle on funding the program. However the Legal Assistant Institute still obstecled on the implementation of the law helping ACT, like on the concept and practicc rank.

Key words : Law Help, Legal Assistant Institute, The Needy People

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Ruang lingkup bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maupun Pasal 56 ayat (2) KUHAP masih terbatas, yakni hanya memberikan bantuan atau perlindungan hukum bagi masyarakat yang tersangkut dengan masalah hukum. Padahal bantuan atau perlindungan hukum yang diperoleh seharusnya memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas, baik dalam pengadilan (*litigasi*) ataupun di luar pengadilan (*non-litigasi*). Pada tahun 2011 yang lalu bantuan hukum akhirnya telah memiliki payung hukum sendiri dengan diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum yang mengatur secara khusus mengenai bantuan hukum. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses terhadap bantuan hukum terutama bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonominya. Selain membutuhkan bantuan hukum masyarakat juga membutuhkan sebuah sarana pendidikan tentang hukum, karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahkan memahami tentang hukum.

Sebagai contoh, kasus yang telah ditangani oleh LBH SIKAP (lembaga bantuan hukum dan studi kebijakan publik) Yogyakarta, yang mana pada bulan September 2013 beberapa orang dari pekerja PT Ameya yang mengundurkan diri dari pekerjaannya dan tidak mendapatkan uang penggantian hak, sebagaimana yang seharusnya didapatkan oleh pekerja yang melakukan pengunduran diri, seperti yang diatur pada undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003,

pada pasal 162 ayat (1) pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak. Karena ketidaktahuan pekerja tersebut maka para pekerja yang mengundurkan diri tersebut tidak memperoleh haknya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Kasus tersebut adalah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi akibat ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta berdampak dalam penegakkan hukum di Indonesia.¹

Sehingga penekanan mengenai pentingnya bantuan hukum sebagai salah satu sarana pendidikan hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat kecil menjadi ide utama dalam penulisan ini, dan berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat judul **“Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Setelah Diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu Sebelum dan Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011?
2. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011?

¹ Hasil wawancara dengan direktur LBH SIKAP Mohamad Yusup,S.H.,L.LM.

Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum

1. Pengertian Orang Yang Tidak Mampu

Tolok ukur orang tidak mampu atau miskin sampai saat ini masih menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan, bukan hanya di negara-negara berkembang bahkan dinegara-negara yang sudah maju sekalipun masih tetap menjadi masalah.² Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Sejarah mencatat orang kaya dan miskin dapat hidup secara berdampingan dan bukan termasuk masalah sosial, sampai masa perdagangan mulai berkembang dengan pesat di seluruh dunia dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru, yang mana masyarakat mulai menetapkan taraf hidup tertentu sebagai suatu masalah sosial. Pada masa itu, individu sadarkan kedudukan ekonominya sehingga mereka mampu menilai dan menyatakan apakah dirinya kaya atau miskin. Masalah sosial akan muncul apabila perbedaan ekonomi pada warga masyarakat ditentukan secara tegas.

2. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam artian luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan miskin dibidang hukum, sedangkan dalam artian sempit adalah jasa hukum yang khusus diberikan secara cuma-cuma kepada orang miskin baik diluar maupun dalam persidangan pidana, perdata, dan tata usaha

² Adnan Buyung Nasution, 1982, *bantuan hukum di Indonesia*, penerbit LP3S Jakarta.

negara, oleh seorang atau lebih yang mengerti mengenai seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum dan hak asasi manusia.

Pengertian bantuan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah pembelaan yang diperoleh seorang terdakwa dari seorang penasehat hukum, suatu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau sewaktu dalam proses pemeriksaan perkaranya dimuka pengadilan.³

Adnan Buyung Nasution dalam buku “Bantuan Hukum Indonesia” menerangkan bahwa, Bantuan hukum ialah sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yakni : Aspek perumusan rumusan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.⁴

Tinjauan Umum Tentang Lembaga Bantuan Hukum

1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Pengertian Lembaga Bantuan Hukum adalah suatu wadah yang terorganisir dengan baik yang bertujuan untuk memberikan bantuan hukum, yaitu:

1. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu dan/atau buta hukum tanpa membedakan agama, suku, ras, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya.

³ Soerjono Soekanto, 1981, *bantuan hukum suatu tindakan sosio yuridis*, penerbit: PT Chalin Indonesia, cetakan pertama, hlm, 21.

⁴ Adnan Buyung Nasution, *Op.Cit.*, hlm 95.

2. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memajukan pengertian dan penghormatan akan nilai-nilai negara hukum dan hak-hak asasi manusia pada umumnya dan khususnya meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat baik kepada pejabat maupun warga negara biasa agar sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum.
3. Membina dan memperbaharui hukum dan pelaksanaan hukum sesuai dengan tuntutan jaman.

2. Sejarah Terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia

Konsep mengenai Lembaga Bantuan Hukum Adnan Buyung ajukan dalam kongres III di Jakarta pada tahun 1969 dan memperoleh persetujuan dan akan didirikan Lembaga Bantuan Hukum diseluruh Indonesia. Dengan adanya Surat Keputusan Peradin tertanggal 28 Oktober 1970 mengenai berdirinya Lembaga Bantuan Hukum DKI Jakarta maka pada tanggal 1 April Lembaga Bantuan Hukum DKI Jakarta berdiri secara fisik. Proyek Peradin ini memperoleh dana dari Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pada masa Ali Sadikin menjabat sebagai Gubernur, yang kemudian dilanjutkan oleh Nolly Tjokropranolo, selain itu memperoleh dana dari masyarakat serta bantuan dari luar negeri yang tidak mengikat. Lembaga Bantuan Hukum DKI Jakarta saat ini dikelola oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan memiliki beberapa cabang.

Dalam perkembangannya lembaga bantuan hukum tumbuh seperti yang terjadi saat ini, dengan nama dan jenis semua disatukan dalam satu wadah norma etika dalam Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Termasuk juga tujuan dari bantuan hukum itu, disatukan dalam satu misi yaitu melindungi harkat dan martabat manusia.

3. Tujuan Lembaga Bantuan Hukum

Adnan Buyung Nasution dalam bukunya “Bantuan Hukum di Indonesia” mengatakan, bagi Indonesia arti dan tujuan program bantuan hukum setidaknya sudah jelas sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum. Berbeda dengan umumnya program bantuan hukum di Asia, Lembaga Bantuan Hukum mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya. Disamping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, Lembaga Bantuan Hukum berambisi untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum. Lembaga Bantuan Hukum juga berambisi untuk turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.⁵

Tujuan pokok yang ingin dicapai oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (sebagai *Pilot Project* PERADIN) yang meliputi tiga hal yaitu :

- 1) Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang buta hukum;
- 2) Menumbuhkan dan membina kesadaran warga masyarakat akan hak-haknya sebagai subyek hukum;

⁵ Adnan Buyung Nasution, *Op. Cit.* hlm, 5.

- 3) Mengadakan pembaharuan hukum (modernisasi) sesuai dengan tuntutan zaman.

Landasan Hukum Tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Yang Tidak Mampu

1. Sebelum Diundangkannya Undang-Undang 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum :

Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, mengenai pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu telah diatur dalam, berbagai ketentuan yaitu :

a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)

Keberadaan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana diatur dalam Bab VI Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 56 ayat (1) dan (2) menyatakan :

- 1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
- 2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

b. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Undang-Undang Nomor

Bantuan hukum secara cuma-cuma juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana yang diatur pada pasal 22 ayat (1) dan (2) yaitu :

Pasal 22 Undang-Undang 18 tahun 2003 menyatakan :

- 1) “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- 2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

c. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Mengenai Pedoman atau Tata Cara Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Pedoman atau tata cara untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, dimana dalam pasal (4) dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan untuk memperoleh bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis kepada Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum. Permohonan meliputi identitas (nama, alamat, dan pekerjaan pemohon) serta uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Selain permohonan, juga melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak dapat menulis dapat mengajukan permohonan secara lisan yang ditujukan kepada Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang selanjutnya dibuatkan secara tertulis kemudian ditanda tangani oleh pemohon dan Advokat atau Lembaga

Bantuan Hukum, selanjutnya surat permohonan tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterima wajib memberikan jawaban serta menunjuk nama-nama Advokat yang akan membantu masyarakat tersebut.

d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Bantuan hukum secara cuma-cuma juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 56 ayat (1) dan (2).

- 1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- 2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

2. Bantuan Hukum Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh negara yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum pada Pasal 1 Ayat (1) dan (2) menyatakan, Ayat (1) bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, Ayat (2) menyatakan: Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok miskin.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan pemerintah ini menegaskan, pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat: Berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program Bantuan Hukum.

Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum kepada Orang Yang Tidak Mampu.

1. Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu sebelum dan setelah diundangkannya Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

a. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum

Sebelum berlakunya undang-undang bantuan hukum, sudah terdapat undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur bantuan hukum. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana, mengatur bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana yang diatur dalam Bab VI pasal 56 ayat (1) dan (2), namun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana ini hanya memberikan bantuan hukum kepada orang yang mengalami masalah hukum litigasi atau orang yang menjadi tersangka

atau terdakwa yang disangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, sudah ada terminologi bantuan hukum berdasarkan undang-undang Advokat mendefinisikan bantuan hukum sebagai “jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu” pemberian bantuan hukum tersebut merupakan kewajiban bagi Advokat yaitu berdasarkan Pasal 22 ayat (1),” Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Namun kewajiban memberikan bantuan hukum oleh Advokat tidak dijelaskan lebih lanjut ruang lingkupnya dan proporsinya.⁶ Tidak ada sanksi pidana maupun denda yang mengatur ketika Advokat tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma. Dalam Peraturan tersebut, memberikan pengertian mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi

⁶<http://masarifmaulana.wordpress.com/category/makalah/02/02/2014>.

pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negaralah yang menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Untuk mengaplikasikannya pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk pos bantuan hukum sebagai tempat rujukan bagi pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

b. Setelah diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum

Dengan disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, *pertama*, melalui Undang-Undang Bantuan Hukum setiap orang, khususnya warga negara tidak mampu berhak atas bantuan hukum dan negara bertanggungjawab memenuhi hak tersebut dengan menyediakan anggaran yang memadai. Hak atas bantuan hukum adalah hak dasar setiap warga negara yang sama kedudukannya dengan hak-hak lain seperti kesehatan, pekerjaan, sandang dan pangan, dan seterusnya. *Kedua*, negara melalui Departemen Hukum dan HAM bertanggungjawab mengelola perogram bantuan hukum secara akuntabel, sehingga implementasi program dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan menerima bantuan hukum yang profesional, bertanggungjawab dan memenuhi rasa

keadilan para pencari keadilan. Dengan adanya program bantuan hukum diharapkan tidak akan terjadi lagi peristiwa salah tangkap, rekayasa kasus, ataupun perlakuan kekerasan selama proses penyidikan atau penyelidikan.⁷

2. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Bantuan Hukum

a) Pada Tataran Konsep

Hasil wawancara dengan Adhitya Johan Rahmadan,SH.M.Kn.⁸ Selaku Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, mengatakan terdapat kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum dalam mengimplementasikan Undang-Undang Bantuan Hukum diantaranya :

- 1) Ada perbedaan cara pandang terhadap subyek yang mendapatkan atau menerima bantuan hukum, konsep dalam Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dapat menerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin, dan harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan, sedangkan menurut Adhitya Johan Rahmadan,SH.M.Kn. yang membutuhkan bantuan hukum bukan hanya masyarakat miskin tetapi juga masyarakat yang termarginalkan.

⁷<http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-103-5fm/16/11/2011/bantuan-hukum-arti-dan-peranannya/14/11/2013>.

⁸ Wawancara dengan Adhitya Johan Rahmadan,SH.M.Kn. pada tanggal 19 Nopember 2013 di LBH Yogyakarta

- 2) Sejalan dengan yang dikatakan Adhitya Johan Rahmadan,SH.M.Kn berdasarkan hasil wawancara dengan Mohamad Yusup,S.H.,L.LM⁹ di LBH SIKAP juga mengatakan terdapat kendala dalam mengimlementasikan tataran Konsep ke tataran Praktis, seperti tentang pengakuan anggota Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan (Paralegal).

b) Pada Tataran Praktis

- 1) Berdasarkan hasil wawancara dengan Adhitya Johan Rahmadan,SH.M.Kn.¹⁰, pada intinya mengatakan kendala dalam tataran Praktis yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum kebanyakan ialah kesulitan untuk mengakses dana yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- 2) Berdasarkan hasil wawancara dengan Mohamad Yusup,S.H.,L.LM yang pada intinya mengatakan, kendala berikutnya, dikarenakan pemberian dana oleh negara kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dilakukan dengan sistem *reimbursement*,

⁹ Wawancara dengan Mohamad Yusup,S.H.,L.LM pada tanggal 09 Nopember 2013 di LBH SIKAP

¹⁰ Wawancara dengan Adhitya Johan Rahmadan,SH.M.Kn. pada tanggal 19 Nopember 2013 di LBH Yogyakarta

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu setelah diundangkannya Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum :
 - a. Setelah diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum telah memiliki legitimasi yuridis/payung hukum dalam pemberian bantuan hukum, sehingga bantuan hukum bukan lagi monopoli organisasi Advokat. Peran LBH dalam memberikan bantuan hukum lebih luas dengan adanya Undang-Undang Bantuan Hukum.
 - b. Setelah diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum peran paralegal menjadi lebih eksis.
 - c. Lembaga Bantuan Hukum setelah diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum tidak lagi menggunakan dana kader atau subsidi silang, namun LBH sudah mendapatkan subsidi dana program bantuan hukum dari pemerintah.
2. Lembaga Bantuan Hukum masih terkendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang Bantuan Hukum dari tataran Konsep maupun tataran Praktis.
 - a) Tataran Konsep
 - 1) Perbedaan cara pandang mengenai subyek penerima bantuan hukum.
 - 2) Konsep pelaporan yang sangat baku dan rumit.

3) Konsep paralegal yang tidak jelas dan tegas.

b) Tataran Praktis

- 1) Kesulitan dalam Pencairan dana karna dilakukan dengan sistem reimbursement.
- 2) Teknis pelaporan yang begitu baku dan rumit.
- 3) Kurangnya pemahaman instansi penegak hukum lain seperti polisi dan pengadilan mengenai Undang-Undang Bantuan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adnan Buyung Nasution, 1981 : *Bantuan Hukum Indonesia*, cetakan pertama, LP3ES, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1981 : *Bantuan Hukum Suatu Tindakan Sosio Yuridis*, Penerbit: PT Chalin Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Internet :

1. <http://rublika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/08/18/mrpo4p-tingkat-kemiskinan-2013-akan-lebih-tinggi-dari-target-pemerintah>, muhamad

igbal,tingkat kemiskinan Indonesia 2013 lebih tinggi dari target pemerintah.23-09-2013.

2. *Scolen.wordpress.com/2011/12/22/kemiskinan-menurut-soerjono-soekanto/kemiskinan di Indonesia/07-10-2013.*
3. *<http://masarifmaulana.wordpress.com/category/makalah/02/02/2014>.*
4. *<http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-1035fm/16/11/2011/bantuan-hukum-arti-dan-peranannya/14/11/2013>.*

